

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan serta dapat memperdalam teori yang digunakan

Pada bagian ini, penulis menyajikan hasil penelitian sebelumnya, penulis melakukan analisis komparatif terhadap berbagai penelitian tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap topik penelitian. Hasil penelitian terdahulu bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam merumuskan metodologi dan analisis penelitian yang sedang dilaksanakan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan penelitian yang orisinal dan inovatif dengan mengacu pada berbagai sumber yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pada penelitian ini, sebagaimana di jelaskan pada tabel atau matriks berikut ini.

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/ Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Arsyi, Rahmad (2022)	Strategi Kasbapol Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini.	Penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki koran digital tidak membuat Mimbar Umum merasa tersaingi; sebaliknya, itu membuat Mimbar Umum tertolong dengan inovasi tersebut. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya dalam menyebarkan koran, Mimbar Umum membuat strategi untuk membuat berita secara cepat, tepat, dan aktual, sehingga masyarakat dapat menilai dan memilih Mimbar Umum sebagai sumber informasi dan pemberitaan yang tepat. Dalam dunia jurnalistik, itu pasti ada.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi komunikasi, perbedaannya objek penelitian terdahulu Kesbangpol Aceh.
2.	Elen Pitria, dkk 2023	Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024	Metode pendekatan doktrinal atau normatif dilakukan melalui pendekatan konseptual.	Hasil penelitian ini adalah Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat	Persamaannya sama-sama membahas Pemilihan Umum	Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

				tipis akan Hasil penelitian ini adalah Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme. Sangat di sayangkan masih banyak pemilih pemula tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umumnya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik.		
3.	Anton Tasijawa (2024)	Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilu Tahun	Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU untuk sosialisasi. Strategi pertama adalah tatap muka; strategi kedua adalah melalui media cetak dan elektronik; dan strategi ketiga adalah bekerja sama dengan organisasi atau organisasi	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan	Perbedaannya dengan penelitian ini pada objek penelitian ini adalah KPU Kota Mataram

		2024 di Kota Mataram		<p>kemahasiswaan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi KPU: a. Regulasi pemerintah, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan KPU, adalah beberapa faktor yang mendukung proses sosialisasi. Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, KPU Kota Mataram mendukung karena memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh masyarakat. Namun, karena luasnya wilayah dan jumlah tenaga kerja yang terbatas, menjadi sulit bagi KPU Kota Mataram untuk menyebarkan informasi, terutama kepada penduduk pedesaan yang membutuhkan komunikasi langsung. Implikasi dari pendekatan komunikasi KPU.</p>	pendekatan deskriptif.	
--	--	----------------------	--	--	------------------------	--

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Strategi Komunikasi

Menurut KBBI strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kata strategi tersebut berasal dari bahasa Yunani klasik yakni “*stratos*” yang berarti tentara dan “*agein*” yang berarti memimpin. Oleh karena itu, strategi berarti memimpin tentara. Kemudian muncul kata “*stragos*” yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang dapat diartikan sebagai seni perang para Jenderal (*The Art of General*). Menurut Alo Liliweri dibukunya yang berjudul “Komunikasi Serba Ada Serba Makna” dalam jurnal massa Hendra Alfani. Mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah, strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan baik. Strategi untuk menciptakan komunikasi konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) dari beberapa opsi komunikasi. Strategi berbeda dengan taktik, strategi komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satu teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. Adapun taktik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. (Adolph, 2016)agaimana pelaku sebagai komunikator mampu meraih perhatian, respons, minat, simpati, dan kepedulian dari wisatawan terhadap komponen-komponen yang ada dalam pariwisata khususnya pemasaran (Saraswati & Afifi, 2022). Menurut Everet M Rogers, dalam buku Hafied Cangara ( 1998),

Komunikasi adalah proses pengalihan ide dari suatu sumber satu penerima atau lebih dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka.

Sementara Laswell dan Onong Uchajana Efendi (1990), mengemukakan bahwa komunikasi itu melibatkan lima komponen yaitu; komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek.

### **2.2.2 Komisi Pemilihan Umum**

- a. Komisi pemilihan umum adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di suatu negara. KPU memiliki tanggung jawab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa KPU memiliki arti penting dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum:
- b. Penyelenggaraan Proses Demokrasi: KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum, yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Pemilihan umum memberikan warga negara kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan, serta menjadi sarana utama untuk mengekspresikan kehendak rakyat.<sup>45</sup>
- c. Menjaga Keterbukaan dan Transparansi: KPU berperan dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum, mulai dari registrasi pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.<sup>46</sup>
- d. Mempromosikan Partisipasi Publik: KPU juga bertugas untuk mempromosikan partisipasi publik dalam proses politik. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam

pemilihan umum dan menyediakan platform bagi warga negara untuk terlibat (Adolph, 2016)

### **2.2.3 Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembangkan berbagai strategi untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sukses, adil, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan oleh KPU:

a. Meningkatkan Partisipasi Pemilih:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih: KPU gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ini dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, seminar, serta kegiatan-kegiatan langsung di komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.
2. Mempermudah Proses Pemungutan Suara: KPU berupaya mempermudah akses pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menambah jumlah TPS, menyediakan layanan jemput bola bagi pemilih penyandang disabilitas, serta memperluas jangkauan e-voting. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan mudah dan nyaman.
3. Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT): KPU terus memperbarui dan meningkatkan akurasi DPT untuk memastikan bahwa data pemilih adalah yang paling mutakhir dan dapat diandalkan. Langkah ini penting untuk mencegah kekeliruan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

b. Menjaga Integritas Pemilu:

1. Penerapan Sistem dan Prosedur yang Transparan dan Akuntabel: KPU menerapkan sistem dan prosedur yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah ini memastikan bahwa setiap proses pemilu dapat diawasi oleh publik dan memenuhi standar integritas yang tinggi.
2. Pengawasan dan Pemantauan: KPU melakukan pengawasan dan pemantauan ketat terhadap seluruh tahapan pemilu untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Pengawasan ini mencakup setiap aspek dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara.
3. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemilu: KPU mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu untuk menjaga integritas proses pemilihan. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah gangguan terhadap proses demokrasi.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPU:

1. Pelatihan dan Pendidikan untuk Anggota dan Staf KPU: KPU secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota dan stafnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Pelatihan ini memastikan bahwa semua personel KPU siap menghadapi tantangan dalam proses pemilu.
2. Membangun Budaya Kerja yang Profesional dan Berintegritas: KPU berfokus pada pengembangan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di antara seluruh anggotanya. Dengan budaya kerja yang kuat,



KPU dapat menjalankan tugasnya dengan efisiensi dan kredibilitas yang tinggi.

d. Membangun Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Terkait:

1. Kerjasama dengan Pemerintah: KPU menjalin kerjasama erat dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu. Dukungan ini termasuk dalam hal logistik, keamanan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemilu.
2. Kerjasama dengan Partai Politik: KPU berkolaborasi dengan partai politik untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan dan prosedur pemilu. Ini penting untuk menjaga keadilan dalam kompetisi politik dan mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil: KPU juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemilu. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa proses pemilu inklusif dan mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, KPU berupaya untuk tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga menjaga integritas, kualitas, dan transparansi proses pemilu di Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi di negara ini.

## **2.2.4 Partisipasi Pemilih**

### **A. Pengertian Partisipasi Pemilih**

Partisipasi adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses sosial, politik, ekonomi, atau budaya, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi, memengaruhi, atau mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi pemilih adalah keterlibatan aktif individu dalam proses pemilihan umum dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang akan memimpin atau mewakili mereka dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Partisipasi pemilih mencerminkan seberapa besar kesadaran politik masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik melalui proses demokratis, yang pada gilirannya akan mempengaruhi legitimasi dan kualitas pemerintahan yang terpilih.

Partisipasi pemilih merujuk pada tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu dan kegiatan politik lainnya. Keterlibatan ini adalah esensial dalam sebuah demokrasi karena mencerminkan bagaimana warga negara berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara (Lestari, 2018). Bentuk-bentuk partisipasi pemilih dapat bervariasi, dan beberapa di antaranya meliputi:

- a. Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum: Ini adalah bentuk partisipasi pemilih yang paling mendasar dan umum. Melalui pemberian suara, warga negara mengekspresikan pilihan mereka dalam memilih pemimpin dan

wakil mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Partisipasi dalam pemilu adalah hak dasar yang dimiliki setiap warga negara dalam sistem demokrasi.

- b. Menjadi Anggota Partai Politik: Dengan bergabung menjadi anggota partai politik, individu dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik, seperti berperan dalam kampanye, pengambilan keputusan internal partai, serta dalam merumuskan kebijakan partai. Keanggotaan dalam partai politik memungkinkan warga untuk lebih langsung mempengaruhi proses politik.
- c. Mengikuti Demonstrasi atau Protes: Demonstrasi dan protes adalah bentuk partisipasi politik yang digunakan untuk menyuarakan pendapat publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang ada atau keinginan untuk perubahan tertentu.
- d. Bergabung dengan Organisasi Non-Pemerintah (NGO): NGO sering terlibat dalam kegiatan advokasi dan lobbying untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dengan bergabung dalam NGO, individu dapat berpartisipasi dalam upaya yang lebih terorganisir untuk mengadvokasi isu-isu tertentu yang penting bagi mereka atau komunitas mereka.
- e. Menghubungi Pejabat Pemerintah: Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menghubungi pejabat pemerintah untuk menyampaikan pendapat atau keluhan terkait isu-isu politik atau kebijakan tertentu. Ini merupakan cara langsung bagi warga negara untuk berkomunikasi dengan pembuat kebijakan dan berusaha mempengaruhi keputusan yang diambil.

- f. Menjadi Relawan dalam Kampanye Politik: Relawan memainkan peran penting dalam kampanye politik. Mereka dapat membantu dalam berbagai aspek kampanye, seperti canvassing, fundraising, dan penyelenggaraan acara. Melalui peran ini, relawan membantu memobilisasi dukungan dan memperkuat basis pemilih untuk kandidat atau partai tertentu.

Partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara terlibat aktif dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasi politik juga membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat (Wardani, 2018).

## **B. Tingkatan Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan intensitas dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik (Putra, 2021). Berikut adalah beberapa tingkatan partisipasi pemilih yang penting untuk dipahami:

- a. Partisipasi Konvensional:

Partisipasi konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang paling umum dan mudah diakses oleh masyarakat. Bentuk partisipasi ini melibatkan tindakan langsung individu dalam proses politik, yang paling utama adalah memberikan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan mekanisme inti dari demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah bangsa dan negara.

Partisipasi dalam Pemilu tidak hanya mencerminkan hak asasi individu, tetapi juga rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Melalui partisipasi ini, masyarakat berperan aktif dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Menghadiri Kampanye Politik:

Menghadiri kampanye politik adalah bentuk lain dari partisipasi konvensional di mana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon pemimpin dan partai politik. Dengan menghadiri kampanye, pemilih dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang para calon dan partai politik yang bersaing. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi saat memberikan suara. Kampanye politik juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai integritas dan kompetensi calon pemimpin (Putra, 2021).

c. Menjadi Relawan dalam Kegiatan Politik:

Menjadi relawan dalam kegiatan politik adalah bentuk partisipasi yang lebih aktif dan intens. Relawan berperan dalam berbagai aktivitas politik seperti membantu kampanye, menggalang dana, dan menjalankan kegiatan operasional lainnya yang mendukung proses politik. Partisipasi sebagai relawan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan kepedulian terhadap hasil pemilihan. Relawan tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada keberhasilan kampanye, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan politik. Selain itu, melalui keterlibatan langsung ini, relawan dapat

memperdalam pemahaman mereka tentang proses politik dan membangun jaringan yang dapat berkontribusi pada pengembangan karir atau peran mereka dalam masyarakat.

Partisipasi pemilih pada berbagai tingkatan ini adalah indikator penting dari kesehatan demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem politik dan merasa bahwa keterlibatan mereka dapat membuat perbedaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi bisa menjadi tanda adanya masalah dalam kepercayaan publik terhadap proses politik atau kurangnya akses terhadap informasi yang memadai (Lestari, 2018).

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan individu dalam proses politik (Husna, 2021). Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih:

- a. **Tingkat Pendidikan:** Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi partisipasi politik. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran mereka dalam proses politik dan demokrasi. Mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, yang mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya.

- b. **Tingkat Pendapatan:** Tingkat pendapatan juga memainkan peran signifikan dalam partisipasi politik. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka terlibat lebih dalam politik, seperti informasi, waktu, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Mereka juga mungkin lebih peduli terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi status ekonomi mereka (Wardani, 2018).
- c. **Usia:** Usia merupakan faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik. Orang yang lebih muda, terutama mereka yang baru memasuki usia pemilih, seringkali memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mereka lebih mungkin terlibat dalam kampanye, protes, atau kegiatan politik lainnya. Namun, partisipasi politik cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, karena individu yang lebih tua mungkin merasa lebih bertanggung jawab terhadap masa depan komunitas dan negara mereka.
- d. **Jenis Kelamin:** Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi partisipasi politik. Secara historis, pria cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik dibandingkan wanita. Namun, perbedaan ini semakin menipis seiring dengan peningkatan kesetaraan gender dan akses yang lebih luas bagi wanita dalam kehidupan politik. Kampanye dan inisiatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik telah membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilu dan proses politik lainnya.

- e. Etnis dan Agama: Faktor etnis dan agama dapat mempengaruhi partisipasi politik individu. Kelompok etnis dan agama tertentu mungkin memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada sejarah politik, akses ke sumber daya, dan representasi dalam politik. Selain itu, identitas etnis dan agama sering kali mempengaruhi preferensi politik dan afiliasi dengan partai politik tertentu, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilu.

Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi sering kali saling terkait dan bersama-sama membentuk pola partisipasi politik dalam masyarakat. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses politik dan pemilu.

#### **D. Manfaat Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan (Nurman, 2023). Berikut adalah beberapa manfaat utama dari partisipasi pemilih:

- a. Memperkuat Demokrasi: Partisipasi politik merupakan pilar utama dalam memperkuat demokrasi. Dengan memberikan suara dalam pemilu, rakyat berperan aktif dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan mengarahkan negara. Ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang



diambil mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat luas (Nurman, 2023).

- b. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Partisipasi politik mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses politik, pejabat publik menjadi lebih sadar bahwa mereka harus menjawab kepada pemilih atas tindakan dan kebijakan mereka. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kebijakan: Partisipasi politik memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan feedback mengenai berbagai isu yang dihadapi negara. Ketika warga negara terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta keinginan berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- d. Memperkuat Persatuan Nasional: Partisipasi politik juga berperan dalam memperkuat persatuan nasional. Dengan terlibat dalam proses politik, warga negara dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan sosial diajak untuk berpartisipasi dalam tujuan bersama. Keterlibatan ini membantu membangun kesadaran kolektif dan solidaritas, serta memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan masa depannya.

Secara keseluruhan, partisipasi pemilih tidak hanya memberi manfaat langsung bagi individu, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas terhadap

kualitas demokrasi, pemerintahan, dan persatuan nasional. Ketika lebih banyak warga negara yang terlibat dalam proses politik, negara cenderung menjadi lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya (Maksudi, 2018).

#### **E. Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih**

Strategi komunikasi adalah suatu perencanaan yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyampaikan informasi, pesan, serta ajakan kepada pemilih pemula dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam proses pemilu. Strategi ini mencakup penentuan audiens sasaran (pemilih pemula), perumusan pesan yang sesuai dengan karakteristik mereka, pemilihan media komunikasi yang efektif, serta evaluasi terhadap dampak komunikasi yang dilakukan.

Meningkatkan partisipasi pemilih adalah salah satu tujuan utama dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih:

- a. Pendidikan Politik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik melalui pendidikan politik adalah langkah awal yang sangat penting. Pendidikan politik tidak hanya memberikan informasi tentang hak dan tanggung jawab warga negara dalam proses pemilu, tetapi juga mengajarkan mereka tentang dampak dari setiap suara yang diberikan. Melalui kampanye edukasi yang efektif, masyarakat dapat

lebih memahami peran mereka dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan masa depan negara.

- b. **Mempermudah Proses Pemungutan Suara:** Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan mempermudah akses ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memperluas pilihan metode pemungutan suara. Ini bisa termasuk penambahan jumlah TPS, menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, serta memperkenalkan metode pemungutan suara yang lebih fleksibel seperti e-voting atau pemungutan suara melalui pos. Dengan demikian, lebih banyak pemilih akan merasa nyaman dan termotivasi untuk menggunakan hak suara mereka.
- c. **Membuat Pemilu Lebih Kompetitif:** Memperkuat kompetisi dalam pemilu dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Ini bisa dicapai dengan mendorong munculnya partai politik baru dan kandidat yang lebih beragam, yang menawarkan pilihan alternatif bagi pemilih. Ketika pemilih merasa bahwa pilihan mereka dapat membawa perubahan nyata, mereka lebih cenderung terlibat dalam proses pemilu.
- d. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Menjamin bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh publik akan meningkatkan kepercayaan

pemilih. Ketika pemilih yakin bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan jujur, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

- e. Melibatkan Pemuda dan Kelompok Marginal: Pemuda dan kelompok marginal sering kali kurang terwakili dalam proses politik. Oleh karena itu, strategi khusus yang mendorong partisipasi mereka sangat penting. Ini bisa mencakup program-program yang ditargetkan untuk mengedukasi dan melibatkan pemuda, serta kebijakan yang memberikan akses dan suara lebih besar bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, partisipasi pemilih dapat meningkat secara signifikan.

Partisipasi pemilih adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik. Dengan strategi-strategi ini, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, memungkinkan rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Partisipasi pemilih yang tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dan peduli terhadap masa depan negara mereka. Khususnya bagi pemilih pemula, yang baru pertama kali ikut dalam proses demokrasi, pendidikan dan bimbingan politik sangat penting agar mereka dapat membuat keputusan yang informatif dan bertanggung jawab.

#### **2.2.5 Pemilih Pemula**

Pemilih pemula adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum. Mereka memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan pembentukan pemerintahan. Pemilih pemula diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya

dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang tepat. Dalam konteks pemilihan umum, pemilih pemula sering menjadi fokus perhatian karena mereka dianggap sebagai pemilih yang masih belum berpengalaman dan memerlukan pendidikan politik yang memadai. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula, seperti sosialisasi pendidikan politik dan kampanye pemilihan. Pemilih pemula juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia. Mereka harus memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan bangsa.

## **2.3 Kerangka Teoritis**

### **2.3.1 Strategi Komunikasi Model Harold D. Laswell**

Istilah komunikasi berasal dari kata “*Communis*” yang berarti ‘*sama*’, dimana maksud dari sama tersebut ialah serupa makna dan artinya. Jadi komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambing atau Bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang yang mengirim pesan dan juga orang yang menerima pesan tersebut. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Effendy, 2008). Dengan kata lain yaitu bahwa strategi komunikasi merupakan suatu tahapan dari gabungan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi.

Seorang ahli ilmu politik yang berasal dari Amerika Serikat pertama kali mengemukakan teori tentang teori komunikasi yaitu Lasswell dengan Teori

Komunikasi Lasswell di tahun 1948. Menurut Lasswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan “apa akibatnya” (*Who? Say what? In which channel? To whom? With what effect?*). dari penjelasan mengenai strategi komunikasi yang disampaikan oleh Lasswell, kita dapat mengetahui elemen-elemen yang terdapat dalam model komunikasi lasswell. Dimana elemen komunikasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Adapun elemen-elemen komunikasi model Lasswell yang dikutip oleh Effendy dalam jurnalnya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, yaitu sebagai berikut :

1. "*Who*" (Siapa),

yang merujuk pada pengirim pesan atau sumber informasi. Dalam strategi komunikasi, pemilihan pengirim pesan sangat penting, karena kredibilitas dan otoritas pengirim akan mempengaruhi sejauh mana audiens mempercayai dan menerima pesan yang disampaikan. Dalam konteks pelayanan informasi, misalnya, pengirim pesan haruslah pihak yang dipercaya oleh audiens, seperti lembaga resmi atau individu dengan keahlian yang relevan. Memilih pengirim pesan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens.

2. "*What*" (Apa)

yaitu pesan yang disampaikan. Pesan yang jelas, tepat, dan relevan dengan audiens adalah hal yang sangat penting dalam strategi komunikasi. Pesan harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks audiens, sehingga audiens tidak mengalami kebingungannya. Misalnya, dalam memberikan informasi tentang layanan kesehatan, pesan harus disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan. Pesan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman audiens dan mempermudah mereka untuk mengambil tindakan yang diinginkan.

### 3. "*Which Channel*" (Media),

yang merujuk pada saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan strategi komunikasi. Di era digital seperti sekarang, berbagai saluran komunikasi tersedia, mulai dari media sosial, aplikasi mobile, hingga media tradisional seperti televisi dan radio. Dalam strategi komunikasi, penting untuk memilih saluran yang paling sesuai dengan audiens yang ingin dijangkau. Misalnya, untuk audiens muda, saluran digital seperti media sosial lebih efektif, sementara untuk audiens yang lebih tua, saluran seperti televisi atau surat kabar mungkin lebih tepat.

### 4. "*To Whom*" (Kepada Siapa),

yang merujuk pada audiens atau penerima pesan. Memahami karakteristik audiens sangat penting dalam strategi komunikasi, karena audiens yang berbeda memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda pula. Dalam komunikasi, penting untuk menyesuaikan pesan dengan audiens agar lebih relevan dan mudah dipahami.

Misalnya, informasi mengenai prosedur pendaftaran layanan kesehatan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens, baik itu pasien, keluarga, atau masyarakat umum. Memahami audiens yang tepat membantu pengirim pesan untuk menentukan cara terbaik dalam menyampaikan informasi yang efektif.

5. "*With What Effect*" (Dengan Efek Apa),

yaitu dampak yang dihasilkan dari komunikasi tersebut. Dalam strategi komunikasi, penting untuk mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas komunikasi dapat diukur melalui feedback, survei kepuasan, atau analisis perubahan perilaku audiens setelah menerima informasi. Jika tujuan komunikasi adalah untuk meningkatkan kesadaran atau mengubah perilaku audiens, maka pengukuran dampak sangat penting untuk mengetahui apakah pesan tersebut berhasil. Evaluasi dampak komunikasi membantu untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah sesuai atau perlu dilakukan perbaikan.

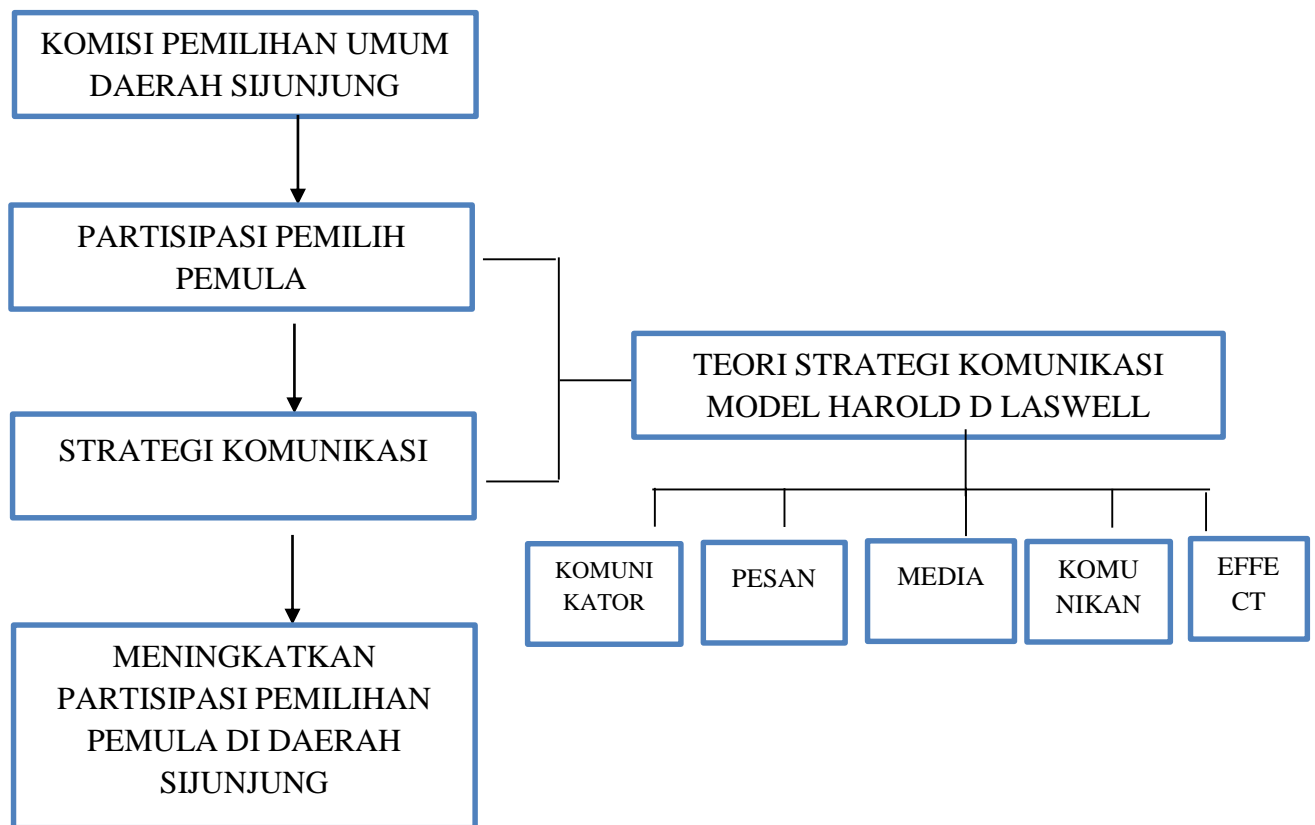
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi komunikasi model Harold D. Laswell, yang mana dari kelima komponen-komponen strategi komunikasi yang dikemukakan Harold D. Laswell akan menjadi pertanyaan pada penelitian ini. Akan tetapi, dari kelima komponen tersebut, peneliti hanya mengambil empat dari komponen tersebut yang dijadikan sebagai pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan menurut hasil observasi yang diawal, peneliti merasa bahwa keempat komponen tersebut merupakan aspek yang dapat menggali informasi yang cukup banyak sesuai dengan subjek penelitian



pada penelitian kali ini. Selain itu, karena dalam penelitian ini sudah jelas media yang digunakannya apa, oleh karenanya peneliti hanya memilih empat dari lima komponen tersebut. Adapun lima komponen itu adalah komunikator, pesan, penerima serta efek atau umpan balik (Laksmiari, 2019)

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian merupakan pondasi konseptual yang membimbing seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan, pertanyaan hingga interpretasi hasil. Ini mencakup kumpulan konsep, teori, dan model yang relevan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk memberikan struktur dan arah pada penelitian. Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang tepat, peneliti dapat mengorganisir gagasan-gagasan mereka secara sistematis, memungkinkan mereka untuk menyelidiki hubungan antar variabel dengan lebih baik.



**Gambar 2.4 kerangka pemikiran**

*Sumber: olahan peneliti*